

**Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Artisanal
di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat**

*Social and economic condition of artisanal fishery
in the North Coast of West Java Province*

Prihandoko S¹, Amri Jahi², Darwis S. Gani², I.Gusti Putu Purnaba²,
Luky Adrianto², dan Iwan Tjitradjaja³

¹Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat

²Universitas Indonesia, Jawa Barat

Abstract

This study is a research about the socio-economic conditions of artisanal fishermen in the northern coast of West Java Province. The purpose of this study was to provide data about the characteristics of socio-economic conditions of fishermen, especially in Java island in the middle is still very limited studies on these themes in Indonesia. Total sample of this study 400 respondents artisanal fishing households in the northern coast of West Java Province who are scattered in the districts of Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang and Bekasi with techniques for sampling random clusters. The findings of this study again confirms the condition of marginal social and economic needs of fishermen who co-management in the field of fisheries with the involvement of various stakeholders. The findings of this study can also contribute in providing a description of one of the stakeholders benefiting from the resources of the coastal artisanal fishermen.

Keywords: Socio-economic, fishermen, management.

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian tentang karakteristik kondisi sosial ekonomi nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menyediakan data mengenai karakteristik kondisi sosial ekonomi nelayan, khususnya di pulau Jawa di tengah masih sangat terbatasnya hasil studi mengenai tema tersebut di Indonesia. Sampel penelitian ini berjumlah 400 responden rumah tangga nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat yang tersebar dalam kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang dan Bekasi dengan teknik penarikan sampel dilakukan secara acak kluster. Temuan dari studi ini kembali menegaskan akan kondisi marjinal secara sosial dan ekonomi dari nelayan yang memerlukan ko-manajemen dalam bidang perikanan dengan pelibatan berbagai stakeholder. Temuan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam menyediakan deskripsi salah satu *stakeholder* pemanfaat sumberdaya pesisir yaitu nelayan artisanal.

Kata kunci: Sosial ekonomi, nelayan, manajemen.

Pendahuluan

Hasil berbagai penelitian tentang golongan masyarakat nelayan di Indonesia menunjukkan kondisi mereka merupakan merupakan golongan masyarakat marjinal dari sisi ekonomi, social maupun politik (Muflikhati, 2010), (Semedi, 2002), (Siswanto, 2008), (Kusnadi, 2000). Sebagai gambaran, sejak tahun 1997/1998 rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan kecil perikanan tangkap (*small scale fisheries*) pada 10 provinsi di Indonesia masih berada jauh dibawah nilai Upah Mini-

mun Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah pada tahun yang sama. Lebih lanjut, pada tahun 1985 ketika pendapatan per kapita Indonesia mencapai Rp.588 ribu, kelompok nelayan pemilik modal memiliki pendapatan Rp.560 ribu, lebih rendah dari pendapatan per kapita nasional. Keadaan demikian tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini.

Upaya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan politik nelayan, tidak terlepas dari tersedianya data dasar mengenai karakteristik kondisi sosial ekonomi mereka. Sebagai golongan masyarakat paling miskin diantara yang miskin (*the poorest of the poor*) ((Muflikhati, 2010), data yang pasti tentang

¹ Korespondensi penulis. Telp: 0811979704
E-mail: pri@inrr.org

jumlah nelayan di Indonesia sampai saat ini tidak pernah tersedia.

Proses pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam kegiatan perikanan tangkap artisanal, merupakan suatu rangkaian kegiatan perikanan tangkap yang melibatkan aspek teknologi penangkapan, operasi penangkapan, pengerahan modal dan tenaga kerja hingga aspek pemasaran ikan. Proses ini merupakan dasar dari kegiatan ekonomi nelayan artisanal di wilayah pesisir. Ironisnya, dalam proses tersebut nelayan artisanal selalu berada dalam posisi marginal dengan kualitas hidup yang rendah yang ditunjukkan oleh kondisi kemiskinan absolut yang mereka hadapi. Pada sisi lain, dari 51 juta nelayan di seluruh dunia lebih dari 99 persen merupakan nelayan golongan *small scale fisheries* dengan umumnya tergantung pada sumberdaya laut. Kondisi sumberdaya laut sendiri sudah terdegradasi sehingga menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh negara-negara dunia berbasis perikanan tangkap. *Food and Organization* (FAO) pada tahun 1997 mencatat sekitar 35% dari 200 sumber perikanan tangkap berada pada kondisi penurunan hasil tangkap, sekitar 25% berada pada tingkat eksploitasi yang tinggi, 40% masih dalam tahap berkembang untuk terus dieksploitasi dan 0% yang berada pada kondisi tidak dieksploitasi sama sekali. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekitar 60% dari keseluruhan sumber perikanan tangkap berada pada kondisi telah diolah secara maksimal dan mengarah pada *high exploitation*. Keadaan demikian tidak berbeda dengan kondisi yang terdapat di wilayah pantai Utara pulau Jawa khususnya Jawa Barat. Selain mengalami *over exploitation*, semakin sempitnya wilayah tangkap (*fishing ground*) antara alat tangkap yang sama maupun berbeda ditambah pula semakin kompleks pihak-pihak berkepentingan lainnya yang memanfaatkan wilayah perairan tersebut. Akhir dari keseluruhan persoalan tersebut adalah kondisi nelayan artisanal yang tetap miskin bahkan menjadi terus miskin.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan, meskipun dalam implementasinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu

tidak berpihak kepada nelayan atau lemahnya penerapan hukum regulasi tersebut. Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dimulai dari keluarnya kebijakan Revolusi Biru sejak tahun 1970-an hingga regulasi di tingkat undang-undang pada saat ini. Bila di bidang pertanian pada saat yang sama pemerintah mengeluarkan kebijakan Revolusi Hijau dalam rangka modernisasi sistem pertanian untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan petani, Revolusi Biru dikeluarkan oleh pemerintah sebagai kebijakan politik perikanan yang pada awalnya ingin mengikuti *success story* di bidang pertanian. Target Revolusi Biru adalah peningkatan kesejahteraan nelayan melalui upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas perikanan khususnya sumberdaya laut dengan berbagai varian kebijakan mulai dari modernisasi penggunaan motorisasi dan teknologi alat tangkap yang modern; kebijakan pemberian fasilitas kredit berupa kredit usaha, mesin-mesin, perahu-perahu dan peralatan penting kepada nelayan; pembangunan fasilitas infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan agar menjamin efektivitas dan peningkatan produksi berupa pelabuhan perikanan, ruang pendingin, tempat pengeringan ikan dan pelelangan ikan (TPI). Pada tahun 1980 – 1996 kebijakan ini diperbaharui dengan diluncurkannya deregulasi perikanan yang mencakup pengembangan alat tangkap, pembangunan pelabuhan dan penambahan armada penangkapan ikan melalui kemampuan produksi dalam negeri maupun impor kapal bekas serta pemberian izin kapal asing.

Dampak kebijakan Revolusi Biru yang dikeluarkan pemerintah memang cukup fantastis yakni sejak tahun 1970 hingga 2003 terjadi peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya. Hal ini disebabkan Revolusi Biru yang didukung aktifitas usaha berskala besar dan padat modal menjustifikasi adanya penetrasi kapitalisme yang tidak berbasis pada kemandirian nelayan kecil dan petani ikan. Secara khusus ada enam implikasi yang muncul akibat dari perkembangan ini; *pertama* degradasi sumberdaya ikan, penurunan daya dukung lingkungan laut dan kerusakan ekosistem; *kedua*, menciptakan ketimpangan kelas yang lebar antara pemilik

kapal dan buruh nelayan; *ketiga*, degradasi hutan mangrove dan pengalihan lahan tambak kepada pemodal; *keempat*, konflik ruang di wilayah pesisir yang disebabkan oleh wilayah kegiatan perikanan, pelabuhan, pariwisata, industri maupun kawasan konservasi; *kelima*, rendahnya kapasitas sumberdaya manusia nelayan sehingga produktifitas mereka juga rendah; dan *keenam* ketidakadilan struktural yang merugikan nelayan miskin dalam keterbatasan akses modal.

Upaya lain selanjutnya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan diantaranya melalui program penyaluran kredit usaha kepada nelayan, bantuan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Keputusan Menteri Pertanian No. 607.Kpts/Um/9/1976 tentang pembagian wilayah penangkapan berdasarkan tingkat kualifikasi peralatan tangkap yang dimiliki oleh nelayan, Keppres No.39/1980 tentang penghapusan operasi kapal pukat harimau, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta lahirnya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat yang mengalokasikan dana sebesar Rp.927,82 milyar untuk mensejahterakan nelayan. Dalam kenyataannya penegakkan regulasi dan implementasi program-program tersebut hingga saat ini sangat lemah dan mengindikasikan seolah-olah regulasi dan kebijakan tersebut tidak pernah ada sebagaimana stagnasi peningkatan kesejahteraan hidup nelayan. Ujungnya, pengalokasian sumberdaya dan sumberdana dalam sistem perikanan perikanan tangkap bagi nelayan kecil masih jauh dari kondisi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Upaya berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan dari sisi sosial, ekonomi dan politik dengan cara penyusunan program penyuluhan sangat berkaitan dengan ketersediaan data dasar mengenai kondisi karakteristik nelayan dalam aspek sosial, ekonomi dan politik. Merujuk kepada hal tersebut, penelitian ini menganggap penting untuk mendeskripsikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan khususnya nelayan

artisanal pemilik perahu di wilayah pantai Utara Provinsi Jawa Barat.

Metode

Desain, Lokasi, dan Waktu

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif *ex post facto* yaitu penelitian mengukur karakteristik dengan menanyakan peristiwa yang telah terjadi. Penelitian ini dilakukan di 16 desa, 11 wilayah kecamatan yang tersebar dalam 5 wilayah kabupaten di pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Kelima kabupaten tersebut adalah kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang dan Bekasi.

Teknik Penarikan Sampel

Unit pengamatan terkecil yang diamati pada penelitian ini adalah rumah tangga nelayan artisanal pemilik perahu yang mengoperasikan sendiri perahunya di wilayah desa-desa pesisir terpilih. Jumlah rumah tangga nelayan artisanal di desa-desa pantai Utara Provinsi Jawa Barat seluruhnya 10.404 KK. Penentuan jumlah sampel mengacu pada rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, yaitu 400 rumah tangga.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang terkumpul merupakan data primer yang mencakup karakteristik demografi yang mencakup umur, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan non formal, pengalaman sebagai nelayan, lama tinggal di desa, lama memiliki perahu sendiri, besaran ukuran perahu, nilai nominal harga perahu beserta peralatan tangkap yang ada di dalamnya, jumlah anak buah kapal serta ukuran mesin perahu yang dimiliki.

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS for Windows. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif yang menjabarkan rentang data, rata-rata dan deskripsi kontekstual dari indikator yang dijabarkan.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Artisanal di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat

Profil umum responden nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Usia nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat berkisar antara 30 – 55 tahun dengan rata-rata usia nelayan di kabupaten Cirebon 46,4 tahun, Indramayu 46,8 tahun, Subang 48,3 tahun, Karawang 47,2 tahun dan kabupaten Bekasi 45,6 tahun. Kondisi demikian tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Muflikhati (2010) yang melihat karakteristik usia nelayan di pesisir pantai Utara dan Selatan Jawa Barat. Penelitian tersebut melihat usia ayah sebagai kepala keluarga nelayan, yang berada pada rata-rata usia 43,1 tahun.

Pekerjaan sebagai nelayan berada dengan rata-rata usia berada pada 46,8 tahun dengan banyaknya jumlah jiwa yang harus ditanggung oleh nelayan dalam satu rumah tangga. Nelayan di wilayah kabupaten Bekasi, harus menanggung 4,6 jiwa dalam setiap rumah tangga tidak termasuk dirinya. Nelayan kabupaten Karawang harus menanggung hidup rata-rata 4,7 jiwa, kabupaten Subang 4,8 jiwa, kabupaten Indramayu 4,6 jiwa dan kabupaten Cirebon 4,6 jiwa. Bila jumlah nelayan artisanal di wilayah pantai Utara Jawa Barat seluruhnya 10.404 jiwa, maka total jumlah jiwa yang tergantung dari nelayan tersebut mencapai tidak kurang dari 40.000. Belum lagi jumlah jiwa yang terdapat dalam rumah tangga nelayan buruh (anak buah kapal) dan rumah tangga yang bergantung sepenuhnya

pada sektor perikanan lainnya seperti pelelangan ikan, pengolahan ikan, bengkel perbaikan dan penjualan perahu dan mesin.

Tingginya jumlah jiwa dalam rumah tangga nelayan artisanal yang tergantung terhadap ketersediaan sumberdaya perikanan di pantai Utara Provinsi Jawa Barat, di sisi lain ternyata diiringi dengan semakin tingginya degradasi sumberdaya perikanan setempat. Hasil penelitian LIPI pada tahun 2005 mencatat bahwa sumberdaya ikan demersal di pantai Utara Jawa dieksplotasi dengan cepat setelah introduksi alat tangkap *trawl* pada akhir tahun 1960.

Perkembangan alat tangkap tersebut merupakan penyebab utama penurunan stok ikan demersal. Sementara itu sumberdaya ikan pelagis telah lama dieksploitasi oleh berbagai alat tangkap diantaranya seperti *jaring payang*. Suatu kenyataan dihadapi bahwa perairan pesisir Utara Jawa sudah menderita kejenuhan bagi usaha perikanan. Kondisi ini diperparah dengan jumlah perahu motor dan nelayan yang tidak sebanding dengan potensi perikanan yang tersedia. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Semedi (2003) yang mencatat angka penurunan hasil tangkapan nelayan yang disebabkan oleh *over fishing* di pantai Utara Jawa sejak tahun 1980-an. Bagi nelayan yang memiliki modal seperti nelayan *purseine*, kejenuhan wilayah tangkap di pantai Utara Jawa mereka dialihkan dengan mencari wilayah tangkap yang masih memiliki potensi ikan hingga kepulauan Natuna, provinsi Kepulauan Riau.

Dalam berbagai literatur temuan hasil penelitian, tingkat pendidikan nelayan umumnya rendah. Penelitian Muflikhati (2010) men-

Tabel 1 Rataan dan rentang kondisi sosial ekonomi nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat

No.	Peubah	Cirebon		Indramayu		Subang		Karawang		Bekasi	
		Rentang	Rataan	Rentang	Rataan	Rentang	Rataan	Rentang	Rataan	Rentang	Rataan
1.	Usia	30 - 55	46,4	30 - 55	46,8	30 - 55	48,3	35 - 55	47,2	30 - 55	45,6
2.	Jumlah Tanggungan dalam Keluarga	1 - 8	4,8	1 - 8	4,6	2 - 7	4,8	1 - 7	4,7	1 - 8	4,6
3.	Pendidikan Non Formal	0 - 15	4,9	0 - 15	5,8	0 - 15	3,5	0 - 15	4,3	0 - 15	4,8
4.	Lama Bekerja Sbg Nelayan	15 - 30	21,5	15 - 30	21,3	15 - 30	22,1	15 - 30	22,3	10 - 30	19,2
5.	Lama Memiliki Perahu Sendiri	8 - 27	16,5	10 - 27	16,8	10 - 27	17,2	10 - 26	17,3	5 - 26	18,5
6.	Indeks Luas Perahu	3 - 48	13,2	3 - 72	18,2	3 - 72	17,8	3 - 48	16,5	3 - 45	14,5
7.	Ukuran Mesin Perahu (<i>d/m PK</i>)	2 - 120	42,6	2 - 120	39,0	2 - 120	35,3	2 - 120	39,6	2 - 24	12,3

catat bahwa rata-rata lama nelayan mengikuti pendidikan formal berada pada angka 4,63 tahun yang berarti tidak mencapai kelas 5 Sekolah Dasar. Hal ini berarti nelayan tersebut rata-rata hanya mengecap tingkat pendidikan maksimal hingga kelas 5 Sekolah Dasar. Minimnya tingkat raihannya terhadap akses pendidikan formal ternyata tidak berbeda dengan kondisi nelayan ketika mereka mengakses jenis pendidikan non formal seperti dalam bentuk kursus, magang atau pelatihan. Nelayan artisanal di kabupaten Cirebon misalnya, rata-rata hanya dapat mengakses pendidikan non formal selama 4,9 jam per tahun, sementara itu nelayan di kabupaten Subang 3,5 jam per tahun, Indramayu 5,8 jam per tahun, kabupaten Karawang 4,3 jam per tahun dan nelayan di kabupaten Bekasi 4,8 jam per tahun.

Rendahnya capaian tingkat pendidikan formal dan non formal nelayan di pantai Utara Provinsi Jawa Barat ternyata tidak seluruhnya sejalan dengan kriteria tingkat kemiskinan yang menggunakan indikator pemasukan dan pengeluaran. Penelitian Muflikhati (2010) bahwa jika kesejahteraan nelayan hanya diukur dengan ukuran ekonomi (pendapatan dan pengeluaran), maka keluarga nelayan dapat dikatakan lebih sejahtera daripada keluarga bukan nelayan. Namun dengan indikator yang memiliki dimensi lebih luas dan lebih menjelaskan kondisi kehidupan dari berbagai aspek seperti akses terhadap pendidikan, terlihat bahwa keluarga nelayan berada dalam kondisi rendah dalam tingkat kesejahteraannya.

Rendahnya tingkat pendidikan formal dan non formal yang dapat diakses oleh nelayan artisanal pantai Utara Jawa Barat, tidak menjadikan sulitnya mereka dapat menguasai teknik-teknik dalam kegiatan perikanan tangkap. Proses sosialisasi dan enkulturasi yang dilakukan oleh nelayan secara turun temurun, menjadikan pengetahuan kemampuan melaut dan menangkap ikan dapat tersampaikan antar generasi. Bagi seorang individu nelayan, proses tersebut tidak berjalan secara singkat, melainkan berlangsung hingga puluhan tahun. Temuan penelitian ini menunjukkan rata-rata lama responden bekerja menjadi nelayan yang mencapai hingga 21,28 tahun. Demikian pula

dengan lamanya waktu telah memiliki perahu secara sendiri rata-rata sudah mencapai waktu 17,26 tahun.

Nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat, merupakan contoh nelayan yang sulit memperoleh pekerjaan lain diluar sektor ke-nelayanan. Bagi nelayan yang tinggal di wilayah pesisir dengan kondisi sumberdaya alam yang masih tersedia, diversifikasi dimungkinkan ke bidang pekerjaan lain ketika untuk sementara bidang pekerjaan nelayan tidak menghasilkan pendapatan yang cukup. Nelayan di pulau Ranai Natuna di kepulauan Riau, misalnya. Manakala mereka tidak bisa melaut karena keadaan cuaca yang buruk, mereka dapat menjadi petani sayuran atau petani perkebunan kelapa yang ada di wilayah mereka. Pada daerah yang sumberdaya alamnya sulit seperti pesisir pantai Utara Provinsi Jawa Barat, diversifikasi pekerjaan sulit dilakukan kecuali mereka melakukan konversi pekerjaan di bidang lain, misalnya menarik becak atau menjadi buruh bangunan. Selain terhambat oleh keterbatasan sumberdaya ekonomi, konversi pekerjaan juga sulit dilakukan karena terhambat oleh aspek sosio-kultural yang sangat terikat dengan pekerjaan sebagai nelayan. Lamanya masa bekerja sebagai nelayan menyebabkan diversifikasi pekerjaan ke bidang lain riskan untuk mereka lakukan, meskipun pekerjaan sebagai nelayan tidak memberikan hasil yang teratur dan stabil. Bagi nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat, laut sudah menjadi "sawah" mereka untuk bermata pencaharian. Pengetahuan yang mereka miliki tentang laut, tidak sekedar hamparan air yang luas namun sudah merupakan petak-petak wilayah yang masing-masing merupakan wilayah "desa-desa ikan" sebagai wilayah tangkap (*fishing ground*). Contoh "desa-desa ikan" sebagai *fishing ground* yang dikenal seperti *karang gosong*, *kelip pertamina* dan lain-lain yang merupakan wilayah tangkap favorit nelayan sebagai wilayah *fishing ground*.

Nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat umumnya merupakan nelayan dengan ukuran perahu relatif kecil dengan indeks luas perahu antara 3 – 71 M². Secara tersebar rata-rata ukuran indeks luas perahu

nelayan masing-masing kabupaten adalah Cirebon 13,2 M², Indramayu 18,2 M², Subang 17,8 M², Karawang 17,3 M² dan kabupaten Bekasi 14,5 M². Indeks luas ukuran perahu berkait dengan ukuran mesin yang digunakan oleh nelayan sebagai penggerak perahu. Rentang ukuran mesin perahu yang digunakan berada antara 2 – 120 PK; dengan rentang terkecil berada pada nelayan artisanal di kabupaten Bekasi yaitu antara 2 – 24 PK. Demikian pula dengan rata-rata ukuran mesin perahu yang mencapai 12,3 PK. Persebaran ukuran indeks luas perahu dan ukuran mesin demikian karena di wilayah kabupaten Bekasi tidak ditemukan nelayan artisanal yang memiliki jenis perahu purse-seine dengan ukuran indeks luas perahu di atas 15 M².

Sebagai konsekuensi logis dari ukuran perahu yang relatif kecil adalah rendahnya daya jangkau kegiatan melaut mereka. Keterbatasan ini disiasati dengan kegiatan melaut dalam bentuk *oneday fishing*, yaitu berangkat melaut pada sore hari dan kembali esok harinya. Strategi lain dalam menghadapi persoalan terbatasnya jangkauan melaut adalah dengan melakukan *andun* yakni mencari *fishing ground* di wilayah kabupaten lain sebelah Barat atau Timur untuk sementara waktu bila di wilayah mereka sedang tidak musim ikan atau tidak memungkinkan untuk melaut karena kondisi cuaca yang buruk.

Tradisi menjadi nelayan *andun* juga dilakukan oleh nelayan artisanal pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Beberapa penelitian menunjukkan adanya tradisi *andun* terutama dilakukan pada wilayah pesisir yang terbatas sumberdaya alamnya. Penelitian Kusnadi (2002) mencatat nelayan di pantai Utara Provinsi Jawa Timur senantiasa melakukan tradisi *andun* ke wilayah kabupaten lain di Jawa Timur yang sedang musim ikan, atau pada saat kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut di wilayah kabupaten asal mereka. Keadaan ini berbeda dengan nelayan yang berada di wilayah dengan sumberdaya alam masih baik. Bila tidak memungkinkan nelayan untuk melaut karena tidak musim ikan atau kondisi cuaca yang buruk, mereka melakukan diversifikasi sementara ke bidang pekerjaan lain seperti bertani. Bagi nelayan pantai Utara Provinsi

Jawa Barat, tradisi *andun* mereka lakukan ke wilayah kabupaten sekitarnya hingga ke Muara Angke Jakarta dan Banten. Waktu pelaksanaan *andun* dapat mencapai 8 bulan atau hingga lepas musim ikan. Salah satu strategi yang dilakukan nelayan karena keterbatasan ukuran perahu dan jangkauan wilayah tangkap adalah dengan melakukan *andun*.

Strategi lain yang dilakukan oleh nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat dalam hal pengadaan modal melaut adalah dengan meminjam kepada *punggawa* yang sekaligus bertindak sebagai pedagang perantara. Betapa tinggi tingkat ketergantungan nelayan terhadap *punggawa*, tidak hanya dari sisi pengadaan modal melaut yang rata-rata dalam satu bulan meminjam hingga 16 – 17 kali, namun dalam hal pengambilan keputusan kegiatan perikanan sebagian besar dari nelayan tergantung pada mereka (*significant other*). Fenomena hubungan patron-klien nelayan dengan *punggawa* pemilik modal sekaligus sebagai pedagang perantara ini teridentifikasi pada banyak literatur hasil penelitian nelayan di Indonesia (Kusnadi: 2002, Semedi: 2002, Siswanto: 2008). Pada posisi demikian, nelayan berperan sebagai alat produksi modal dari *punggawa* untuk menjamin tersedianya stok ikan yang mereka jual. Karena ikatan hutang antara nelayan terhadap *punggawa*, maka nelayan harus menjual ikan hasil tangkapan kepada *punggawa* yang memodalinya melaut dengan harga yang ditentukan oleh *punggawa*. Di sisi lain kondisi demikian tidak didukung oleh institusi perdagangan ikan yang berpihak kepada nelayan. Dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terdapat di pantai Utara Provinsi Jawa Barat seperti Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang dan Bekasi; institusi TPI pada umumnya tidak berjalan seperti yang diharapkan meskipun telah ada regulasi yang mewajibkan untuk menjual ikan melalui sistem lelang di TPI. Perda Nomor 5 Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Indramayu merupakan salah satu contoh regulasi kewajiban menjual ikan hasil tangkapan di laut melalui institusi lelang di TPI. Namun demikian regulasi ini hanya semata menjadi instrumen bagi retribusi dana lelang kepada Pemda melalui TPI. Kecendrungan yang

terjadi pada semua wilayah kabupaten adalah pembelian langsung ikan dari nelayan kepada *punggawa* yang memodalinya asalkan *punggawa* membayar retribusi kepada TPI setempat. Tidak sedikit pula kasus yang terjadi yaitu pembelian langsung ikan dari nelayan ke *punggawa* tanpa melalui retribusi lelang ke TPI.

Urgensi Temuan Penelitian bagi Ko-Manajemen Kegiatan Perikanan di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat

Salah satu persoalan ekonomis yang mendasar pada kerja penangkapan ikan laut adalah sifat kepemilikan ikan laut sebagai sumber milik bersama (Anderson, 1977), (Semedi, 2002). Keadaan ini mengakibatkan berkembangnya sifat individualistik yang tinggi di kalangan para nelayan bahwa semua nelayan berkeinginan untuk memetik manfaat sebesar-besarnya dari sumberdaya yang ada tanpa ada seorangpun di antara mereka yang mau melakukan sesuatu untuk menjaga agar sumberdaya tersebut tetap ada pada tingkat yang menguntungkan (Hardin, 1968). Salah satu alternatif untuk menjaga agar tragedi sumberdaya milik umum ini tidak terjadi, adalah diubahnya status dari milik umum (bukan milik siapapun) menjadi milik orang tertentu; agar stok ikan laut ini berada dibawah klaim kepemilikan tunggal (Scott, 1986). Dengan cara ini si pemilik dapat melakukan eksploitasi pada tingkat ekonpmis yang optimal.

Alternatif lain untuk mencegah tragedy sumberdaya milik bersama adalah dengan melakukan kontrol terhadap *fishing effort*, tingkat upaya penangkapan (Stokes, 1987), (Semedi, 2002). Di sini para nelayan diatur agar tidak melakukan penangkapan melewati daya dukung stok ikan yang ada.

Pada sisi yang lain perairan wilayah pantai Utara Provinsi Jawa Barat, merupakan *fishing ground* yang bila dilihat dari kepemilikan (*property right*) sebagai kawasan tumpang tindih dalam penguasaan yaitu *common property right*, *state property right* dan *private property right*. *Common property right* di perairan pantai Utara Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan penggunaan alat

tangkap trawl dan sejenisnya yang merusak lingkungan demi mendapatkan hasil tangkapan maksimal, meski hal ini dilarang. *State property right* ditunjukkan dengan penguasaan wilayah laut oleh Negara, dengan pemanfaatan dilakukan oleh masyarakat sebagai *stakeholders* (termasuk nelayan) demi kepentingannya masing-masing. *Private property right* ditunjukkan dengan penguasaan sebagian wilayah laut oleh pihak swasta yang tidak memungkinkan *stakeholders* lain seperti nelayan memasuki wilayah perairan tersebut. Situasi ini diantaranya ditunjukkan dengan kasus pengkaplingan laut dan adanya fasilitas anjungan milik perusahaan migas *offshore* yang tidak boleh dimasuki oleh nelayan dalam radius 500 meter sekitarnya. Adanya perbedaan *regiem property* ini, menimbulkan konflik antar *stakeholders*. Pada beberapa lokasi, kasus konflik sejenis sudah terjadi di perairan pantai Utara Provinsi Jawa Barat.

Dari perspektif ko-manajemen perikanan, pengelolaan perikanan tidak dapat dilepaskan dari filosofi keterkaitan antara ekosistem, sumberdaya perikanan dan manusia yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan itu sendiri. Pengelolaan perikanan tidak akan pernah ada apabila ekosistem dan sumberdaya perikanan sebagai salah satu “produk” ekosistem alam (air tawar, air laut, payau dan lain-lain) mengalami degradasi atau punah (Adrianto *et al*, 2009). Dalam konteks ini interaksi yang ada dalam sistem alam (ekosistem perairan) dan sistem manusia (*social agent and actor*) serta prinsip-prinsip yang melatarbelakangi bagaimana kedua system ini bekerja perlu diketahui dengan baik. Dasar pemahaman inilah yang menjadi latar belakang dari seluruh pola tata kelola perikanan dalam bentuk ko-manajemen perikanan (*fisheries co-management*).

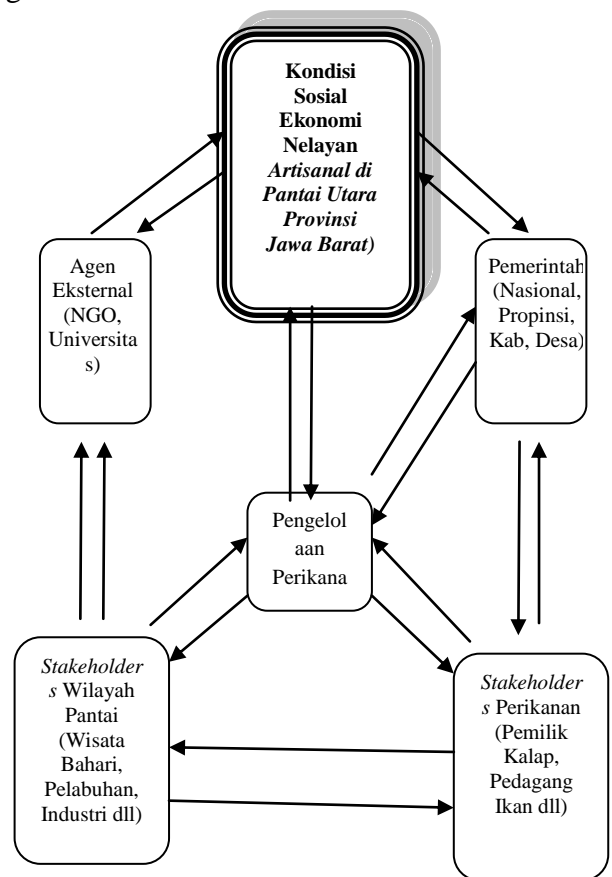
Ko-manajemen perikanan (*fisheries co-management*) adalah pola pengelolaan dimana pemerintah dan pelaku pemanfaatan sumberdaya (*user group*) berbagi tanggungjawab (*sharing the responsibility*) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan tujuan mewujudkan keseimbangan tujuan ekonomi dan sosial dalam kerangka kelestarian ekosistem dan sumberdaya perikanan

(Adrianto *et al*, 2009). Sebagai suatu proses, di dalam ko-manajemen perikanan terdapat 4 *stakeholders* kunci, yaitu (1) pelaku pemanfaat sumberdaya dimana dalam kelompok ini termasuk nelayan dan pembudidaya ikan; (2) pemerintah, termasuk pusat dan daerah; (3) *stakeholders* lain dimana di dalamnya termasuk anggota masyarakat lain, pemilik kapal, pelaku perdagangan perikanan, pengolah ikan dan lain-lain; (4) agen perubahan termasuk penyuluh perikanan, LSM, perguruan tinggi dan lembaga riset.

Dalam konteks temuan penelitian tentang perilaku nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat, nelayan tangkap artisanal merupakan salah satu *stakeholders* penting sebagai pelaku yang langsung melakukan eksploitasi sumberdaya perikanan. Di tengah semakin tingginya degradasi sumberdaya perikanan di perairan pantai Utara Provinsi Jawa Barat, semakin terbatasnya *fishing ground* mereka oleh sebab pemanfaatan wilayah perairan semakin kompleks, ketidakpastian kondisi alam (cuaca) serta ketidakpastian regulasi yang berpihak kepada nelayan dan lemahnya penegakkan hukum dari regulasi tersebut. Nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat harus melakukan perilaku kegiatan perikanan tangkap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial mereka.

Proses ko-manajemen perikanan di pantai Utara Provinsi Jawa Barat adalah proses yang melibatkan *multi-stakeholders* termasuk nelayan artisanal sebagai salah satu pelaku utama dalam kegiatan perikanan tangkap. Sejalan dengan hal tersebut, temuan penelitian ini telah menyediakan gambaran tentang perilaku nelayan artisanal di tingkat rumah tangga (*household*) dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nelayan pada proses kegiatan perikanan tangkap di pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Sebagai suatu kegiatan yang kompleks, ko-manajemen perikanan di pantai Utara Provinsi Jawa Barat harus pula melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap peran-peran yang dilakukan oleh *stakeholders* lain. Dengan demikian, temuan studi ini mendorong ke arah visi baru dalam pengembangan kegiatan perikanan nelayan skala kecil (*small scale fishery*). Menu-

rut Berkes *et al* (2000), visi baru pengembangan kegiatan perikanan nelayan kecil (*small scale fishery* diawali dengan perubahan secara gradual pendekatan *top-down* ke arah *bottom-up* yang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1980-an. Prioritas nilai-nilai lokal dibutuhkan sebagai acuan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir yang menyeimbangkan antara dampak dari globalisasi dengan menyediakan kearifan lokal sebagai identitas sosial dan modal sosial guna membantu nelayan tetap bertahan hidup dalam kesatuan antara lingkungan di tengah ekonomi global.



Gambar 2. Keterlibatan banyak pihak dalam pengelolaan perikanan dan urgensi temuan Studi Perilaku Nelayan Artisanal dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Pantura Jawa Barat (Berkes, *et al*, 2000), (Adrianto, *et al* 2009)

Simpulan

Temuan penelitian ini menjelaskan tentang kondisi sosial ekonomi nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat seolah menegaskan kembali hasil temuan penelitian-

penelitian sebelumnya, gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi nelayan di wilayah studi mengindikasikan keadaan nelayan artisanal yang berada pada posisi marjinal, di tengah di tengah kondisi degradasi sumberdaya laut yang semakin menurun, kondisi kemiskinan absolut yang dihadapi oleh nelayan artisanal dan semakin kompleksnya persoalan pemanfaatan sumberdaya pesisir di Indonesia dengan semakin beragamnya *stakeholder* pemanfaat sumberdaya tersebut. Dalam upaya menyusun ko-manajemen kegiatan perikanan di pantai Utara Provinsi Jawa Barat, gambaran tentang kondisi sosial ekonomi nelayan artisanal pada studi ini memberikan base-line data tentang gambaran salah satu *stakeholder* penting pemanfaat sumberdaya pesisir.

Daftar Pustaka

- Abrecombi, Nicholas.(1984). Dictionary of Sociology. New York: Penguin Books.
- Agnes, Michael. (2000). Webster's New World College. IDG India.Ajzen, Icek, 2005. Attitudes, Personality and Behaviour, New York: McGraw-Hill Education.
- Arif Satria. (2002). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta: Cidesindo.
- Aldirch. (2009). The Development of Effective Message Content for Suicide Intervention Theory Planned Behavior dalam Journal of Crisis, Vol.30 (4): 174 – 179. www.proquest.pqd/web
- Beedell, Jason dan Rehman, Tahir , (2000). Using Social Psychology Models to Understand Farmers' Conservation Behaviour dalam Journal of Rural Studies. Vol.6. www.proquest.pqd/web.
- Burton, Rob. J.F., (2004). Re-conceptualizing the "behavior approach" in agricultural studies: a socio-psychological perspective, dalam Journal of Rural Studies, 20 (2004). 359 – 371. www.jstore.org
- Balai Pustaka, (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Berkes, Fikret, Robin Mahon, Patric McConney, Richard Pollnac dan Robert Pomeroy. (2001)., Managing Small-scale Fisheries: Alternative Directions and Methods. Ottawa: International Development Research Center.
- Bohannon, Paul. Glazer, Mark. (1988). High Point in Anthropology. New York. Alfred A. Knopf.
- Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2007). Rencana Arah Pengembangan Bisnis Kelautan Jawa Barat. Bandung: Bappeda Provinsi Jawa Barat.
- Budiono, Pitojo R. (2006). Karakteristik Petani Tepi Hutan dan Kompetensinya dalam Pelestarian Hutan Lindung di 12 Desa di Provinsi Lampung. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Photocopied.
- Budi, Siswanto. (2008). Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan. Malang: Laskbang Mediatama.
- Charles, T. Anthony. (2001). Sustainable Fishery System. London: Blackwell Science.
- Eriyanto, (2007). Teknik Sampling: Analisis Opini Publik. Yogyakarta: LKIS.
- Emmerson, Donald K. (1982). Order of meaning: understanding political change in a fishing community in Indonesia, dalam Anderson, Benedict and Kahin, Audrey (editor). Interpreting Indonesia Politic: Thirteen Contribution to the Debate. Ithaca: Cornell Modern Indonesian Project.
- Fauzi, Akhmad. (1998). The Management of Competing Multi Species Fisheries: A Case Study of Small Pelagic Fisheries on North Coast of Central Java. . Canada: Simon Fraser University. www.proquest.pqd/web
- Firth, Raymond, (1971). Malay Fishermen: Their Peasant Economy. London: Routledge & Keagan Paul Ltd.
- Hardin, Garret. (1968). Tragedy of the commons dalam Science (162): 1243 – 1248.

- Istiqlalayah, Muflikhati. (2010). Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus di Wilayah Pasisir Jawa Barat, dalam *Jurnal Ilmu Keluarga*. IPB Bogor. Januari 2010. 1 – 10.
- Kerlinger, F.N. (2004), *Azas-azas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Kusnadi, (2000). *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Luky, Adrianto. (2007). *A Snapshot on Small Scale Fisheries*. Sebuah Pengantar Focus Group Discussion. PKSPL IPB.
- Luky, Adrianto, Tridoyo Kusumastanto dan Ario Damar. (2006). *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut*. Jakarta. Universitas Terbuka Press.
- Luky Adrianto, Dede Irving Hartato, Daniela Kalikoski dan Tiran Yunanda. (2009). *Peningkatan Kapasitas untuk Pengarus-Utamaan Ko-Manajemen Perikanan di Indonesia*. Jakarta: FOA dan DKP.
- Polnac. Richard B. (1988). *Karakteristik Sosial dan Budaya dalam Pembangunan Berskala Kecil dalam Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan Pembangunan Pedesaan* editor Cernea Michael Jakarta: UI Press.
- Pujo Semedi. (2002). *Close to the stone, far from the throne: The story of a Javanese community 1820s – 1990s*. Yogyakarta: Benang Merah.
- Pujo, Semedi, (2002). *Otonomi Daerah di Sektor Penangkapan Ikan*, dalam *Jurnal Populasi*, 13 (1).
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. (2004). *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill.
- Rokhmin, Dahuri. (1996). *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Seymour-Smith, Charlotte. (2000). *Macmillan Dictionary of Anthropology*. New York: Macmillan Reference Books.
- Sutejo, Kuat Widodo, (2007). *Dinamika Kebijakan terhadap Nelayan: Tinjauan Historis pada Nelayan Pantura Jawa*. Fakultas Sasta Universitas Diponegoro. Photocopied.
- Zulfarima. (2003). *Persepsi dan Partisipasi Petani terhadap Usaha Pertanian Konservasi: Studi Kasus Kelompok Pengelola Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Hutan Lindung Register 45 B. Kabupaten Lampung Barat. Provinsi Lampung*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Photocopied.
- Peraturan Pemerintah
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Tridoyo, Kusumastanto (2004), *Menggugat Revolusi Biru dalam Sinar Harapan*. Sinar Harapan.